

Apri Damai Sagita Krissandi
Universitas Sanata Dharma
Dosen FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Politik Mbelgedes: Pintu Belakang Kekuasaan

Reshuffle, Gibran, Anwar Usman, Rocky, Qodari, dan para elite yang bergeser kursi. Membaca pintu belakang kekuasaan yang tak pernah tertutup.

19 jam lalu

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 0

Tutup Iklan X



Ilustrasi AI

***

Di Indonesia, ternyata kehilangan jabatan tidak selalu berarti kehilangan kekuasaan. Ada pintu depan untuk mereka yang dilantik, tetapi rupanya tersedia juga pintu belakang bagi mereka yang dicopot: pindah lembaga, berganti jabatan, lalu tetap berada beberapa langkah dari Presiden. Karena itu, reshuffle kali ini menarik bukan karena siapa yang keluar, melainkan karena siapa yang ternyata tidak pernah benar-benar pergi.

Luar Negeri menjadi Menko PMK. Ini bukan *exit*, melainkan *redeployment*: rantai komandonya berubah, tetapi akses politiknya dipertahankan.

Pratikno bukan pejabat yang datang kemarin sore. Ia Mensesneg Jokowi selama dua periode, kemudian dipertahankan Prabowo sebagai Menko PMK, dan sekarang justru ditempatkan sebagai ketua lembaga yang secara langsung memberi nasihat kepada Presiden. Maka ada pertanyaan yang lebih menarik daripada "mengapa Pratikno dicopot?": mengapa orang yang dianggap tak lagi diperlukan di kabinet justru dianggap sangat diperlukan di dekat Presiden?

Jawaban paling lunak adalah pengalaman. Jawaban politiknya adalah jaringan: pengetahuan birokrasi, hubungan antarelite, pengalaman Istana, dan kemampuan membaca mesin pemerintahan tidak ikut dicopot bersama jabatan. Jika demikian, Pratikno adalah contoh bahwa dalam politik, jabatan bisa hilang, tetapi nilai strategis seseorang tetap dipelihara.

Lalu masuklah Rocky Gerung dan Muhammad Qodari. Ini pasangan yang secara politik hampir seperti lelucon: Rocky, pengkritik keras kekuasaan, kini duduk di lembaga penasihat Presiden; Qodari, yang pernah dikenal dengan gagasan tiga periode Jokowi, justru menjadi Sekretaris Wantimpres.

Tetapi justru di situlah menariknya. Rocky membawa modal politik berupa kritik dan jarak terhadap kekuasaan, sedangkan Qodari membawa pengalaman berada di dalam orbit kekuasaan dan komunikasi politik. Dalam satu lembaga, keduanya seperti dua

Rocky mengatakan Wantimpres harus kritis terhadap kebijakan Presiden. Bagus, tentu saja, tetapi teori politik mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat percaya pada label “pengkritik”. Kritik yang berada di luar sistem memiliki daya tekan berbeda dengan kritik yang telah memperoleh kursi, akses, dan jalur komunikasi langsung ke penguasa.

Inilah yang disebut kooptasi elite. Kooptasi tidak selalu berarti membungkam seseorang; kadang justru membuat kritik lebih berguna bagi penguasa karena kritik tersebut dipindahkan dari jalanan ke ruang rapat. Rocky boleh tetap kritis, tetapi pertanyaan strategisnya adalah: setelah kritik memperoleh kursi, apakah daya gigitnya tetap sama?

Qodari juga mengalami perpindahan yang menarik. Dari ruang komunikasi pemerintah ia masuk ke sekretariat Wantimpres, sementara posisinya sebelumnya diisi Syahganda Nainggolan. Artinya, bukan hanya orangnya yang berpindah, tetapi fungsi politiknya juga bergeser: dari mengelola pesan pemerintah menuju ruang yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Kemudian datang Anwar Usman, dan di sinilah pintu belakang kekuasaan menjadi jauh lebih sensitif. Pada 2023, MKMK memberhentikan Anwar dari jabatan Ketua MK setelah menyatakan adanya pelanggaran terhadap sejumlah prinsip etik, termasuk ketakberpihakan, integritas, independensi, dan kepantasan; MKMK juga melarangnya terlibat dalam perkara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

untuk menyimpulkan bahwa pengangkatan Anwar dimaksudkan untuk memengaruhi perkara tersebut; Anwar juga menyatakan tidak akan melakukan intervensi. Tetapi secara politik, sulit mengabaikan ironi waktunya: orang yang sejarah etiknya bersinggungan dengan perkara yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran kini menjadi penasihat Presiden ketika persoalan Gibran kembali mengemuka.

Di sini Gibran memang menjadi penangkal petir. Perhatian publik tersedot kepada ijazah, syarat pendidikan, Putusan 90, KPU, dan legalitas pencalonan, sementara pada saat bersamaan struktur kekuasaan sedang dirombak. Kita tidak perlu mengarang bahwa semua itu dirancang bersama untuk melihat efek politiknya: petir yang menyambar satu titik bisa membuat orang tidak melihat bangunan yang sedang direnovasi.

Bangunan itu adalah peta kekuasaan. Listyo Sigit tidak lagi menjadi Kapolri, tetapi langsung menjadi Kepala Staf Kepresidenan; ia kehilangan kendali atas institusi kepolisian, tetapi tetap berada sangat dekat dengan pusat keputusan Presiden.

Ini bukan sekadar turun pangkat atau naik jabatan. Dalam politik, kekuasaan ditentukan bukan hanya oleh besarnya institusi yang dipimpin, tetapi juga oleh kedekatan dengan pusat informasi dan pengambil keputusan. Sigit kehilangan satu jenis kekuasaan, tetapi memperoleh jenis akses yang berbeda.

Sugiono memberi contoh lain. Ia meninggalkan Kementerian Luar Negeri dan masuk ke posisi Menko PMK, sementara diplomat karier Arrmanatha Nasir mengambil alih

Di sini terlihat formula yang cukup rasional: loyalitas politik ditempatkan pada posisi koordinasi yang luas, sementara keahlian teknis diberikan kepada profesional. Dengan kata lain, orang dekat tidak harus menguasai semua bidang; cukup berada di titik yang menentukan arah, sementara teknokrat mengerjakan sektor yang membutuhkan keahlian.

Bahlil bahkan memperoleh dua lapisan pengaruh: tetap sebagai Menteri ESDM sekaligus menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Pada saat yang sama, Sekjen Golkar M. Sarmuji masuk sebagai Menteri Perindustrian. Jika dibaca sebagai peta kekuasaan, ini bukan sekadar pembagian kursi, tetapi penempatan jaringan politik pada sektor yang sangat penting bagi agenda energi dan industrialisasi.

Karena itu, jangan membaca reshuffle seperti papan skor. Menteri yang dicopot belum tentu kalah, orang yang dilantik belum tentu paling berkuasa, dan orang yang masuk Wantimpres belum tentu hanya tukang memberi nasihat. Yang harus dibaca adalah jenis akses yang diberikan kepada setiap orang.

Itulah yang membuat 26 anggota Wantimpres menarik. Di sana ada Pratikno, Qodari, Rocky Gerung, Anwar Usman, Budi Gunawan, Hatta Rajasa, Chairul Tanjung, tokoh-tokoh agama, pengusaha, mantan pejabat keamanan, akademisi, dan profesional. Ini bukan kabinet kedua, tetapi ia menyerupai peta konsolidasi berbagai pusat pengaruh di sekitar Presiden.

Secara teori, strategi seperti ini bisa disebut *elite accommodation*: tidak semua elite harus sepakat, tetapi sebanyak mungkin pusat pengaruh diberi tempat dalam satu

sosial-politik memperoleh representasi.

Namun strategi itu juga punya risiko. Terlalu banyak elite di sekitar satu pusat kekuasaan berarti semakin banyak kepentingan yang harus dinegosiasikan; stabilitas bisa meningkat, tetapi keputusan juga bisa semakin dipenuhi kompromi. Wantimpres dapat menjadi ruang deliberasi, tetapi juga bisa menjadi ruang tempat kepentingan elite saling mengunci.

Maka politik mbelgedes kali ini bukan terutama tentang siapa dicopot. Ini tentang pintu mana yang digunakan seseorang untuk tetap berada di dalam kekuasaan. Pratikno keluar dari kabinet dan masuk Wantimpres; Sigit keluar dari Polri dan masuk Istana; Qodari keluar dari komunikasi pemerintah dan masuk ruang penasihat; Rocky masuk dari luar sebagai pengkritik; Anwar Usman kembali ke lingkar kekuasaan ketika kontroversi Gibran kembali menghangat.

Dan Gibran? Ia memang penangkal petir. Tetapi mungkin petir itu justru berguna karena membuat kita melihat sesuatu yang lebih besar: peta pintu masuk dan pintu keluar kekuasaan sedang diubah.

Pertanyaan akhirnya bukan siapa menang dan siapa kalah. Pertanyaannya lebih sederhana dan lebih mengganggu: kalau orang-orangnya terus berpindah kursi tetapi tetap berada di sekitar pusat yang sama, sebenarnya siapa yang sedang memindahkan kursi-kursi itu?

#gaya-licik-orang-politik #budaya-malu #rocky-gerung



Apri Damai Sagita Krissandi

Universitas Sanata Dharma

6 Pengikut

+ Ikuti Penulis



Politik Mbelgedes: Pintu Belakang Kekuasaan

19 jam lalu



Ketika Pejabat Terlalu Sering Ngawur, Masyarakat Masuk Mode Autopilot

3 hari lalu

Lihat Semua Artikel

Baca Juga

Sabrina Helga

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta

☆ Berita Pilihan

Blind box menawarkan hiburan dan kejutan, tetapi rasa penasaran bisa mendorong pembelian berulang hingga menjadi konsumtif....



0



Ariva Zahrani
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN \x22Veteran\x22...

Berita Pilihan

Awalnya Cuma FOMO Lari, kok, Malah Jadi Boros?

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN \x22Veteran\x22 Yogyakarta - 23 jam lalu

Lari yang sebenarnya sederhana perlahan berkembang menjadi gaya hidup penuh tuntutan. Lari untuk sehat atau demi memenuhi standar orang lain?...



0



Fia Oktaviyani
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Inflasi Bulan September Terkendali, tapi Dapur Rakyat Terasa Berat

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

BPS catat inflasi September 2026 sebesar 3,28%. Kenaikan harga pangan tekan daya beli masyarakat menengah ke bawah....





W.S Nurbaiti
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Disleksia Kebijakan Pemimpin Negeri



Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Negara sedang mengencangkan ikat pinggang lewat efisiensi, tetapi struktur birokrasi justru bertambah dengan pembentukan Kemenko baru...

0



Aulya Fitriana Putri R
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Parkir Rp20 Ribu di Jogja: Harga Sebuah Ketidakpastian



Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Tarif parkir tanpa karcis di Jogja memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan kenyamanan wisatawan. ...

0

Eben Ezer Siadari
Penulis Indonesiana Tempo

Berita Pilihan

Gelar Pahlawan bagi Wartawan Peliput Anak Krakatau

nyata dari penghakiman berbasis just-world fallacy....



0



Nadiva Agustina Putri
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Di Balik Vonis Nadiem: Menagih Tanggung Jawab Raksasa Digital

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Vonis Nadiem membuka persoalan tanggung jawab dalam proyek teknologi pemerintah serta pentingnya transparansi dan pengawasan anggaran negara....



0



Laura Nanda
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Politik Selalu Mengalir dalam Darah Para Wanita

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Keresahan sebagai wanita yang hidup atas tekanan aturan....



0

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Pancasila tidak membutuhkan pemujaan yang membutakan. Tapi pengamalan yang nyata. Tidak cukup berdiri tegak ketika teks Pancasila dibacakan....



1



Apri Damai Sagita Krissandi
Universitas Sanata Dharma

Berita Pilihan

Ketika Pejabat Terlalu Sering Ngawur, Masyarakat Masuk Mode Autopilot

Universitas Sanata Dharma - 3 hari lalu

Ketika pejabat terlalu sering bicara ngawur, masyarakat bukan hanya marah. Mereka bisa lelah, kehilangan percaya, lalu memilih autopilot....



0

Artikel Terpopuler



Diki Aulia Rahman
Penulis

Gen Z Tak Hanya Ingin Kerja Remote, tapi Juga Waktu yang Fleksibel

Penulis - 19 jam lalu

0



Djohan Chaniago
Penulis Indonesiana

Suyudi Sapu Bersih Kursi Kapolda se-Jawa di Hari Pertamanya



Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Kapolri Suyudi mutasi 19 Kapolda di Indonesia ...

0



Ismail Suardi Wekke
Penduduk Kota Sorong

Asian Games 2026: Ada Apa dengan Jepang?



Penduduk Kota Sorong - 1 hari lalu

Berbagai tajuk rencana media internasional riuh menyuarakan keluhan banyak delegasi....

0

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Ketika tradisi penghormatan pada orang tercinta berbenturan dengan realitas ekonomi dan pertanyaan tentang makna kebaikan....



0



Rima Sabila
Penulis Indonesiana

Menembus Akar Kriminalitas: Pentingnya Sinergi Hukum dan Benteng Sosial

Penulis Indonesiana - 19 jam lalu

Kriminalitas marak terjadi? Hukuman berat saja tak cukup! Simak strategi penanganan kejahatan dari akar ekonomi dan komunitas....

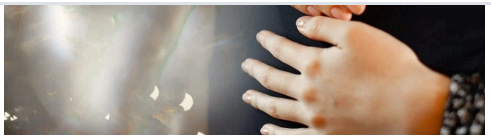


0



Aristian .
Penulis Indonesiana

Cuti haid berbayar dan cuti melahirkan hingga 6 bulan dijamin hukum. Kenali aturannya, hak upah, cuti suami, dan larangan PHK...



0



Djohan Chaniago
Penulis Indonesiana

Tongkat Kapolri Berpindah, Suyudi Ario Seto Naik Jadi Jenderal

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Presiden Prabowo menyematkan Bintang Mahaputera Adipurna pada Listyo Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputera Adipradana pada Komjen Dedi Prasetyo...



0



Wisnu Aji Nugroho, Cacp., Qrop.
Praktisi Manajemen Strategis dan Tata Kelola

Koperasi Desa Provinsi Riau: Mengonsolidasikan Ekonomi Desa, Menurunkan Emisi

Praktisi Manajemen Strategis dan Tata Kelola - 3 hari lalu

Berapa banyak koperasi yang benar-benar menjadi mesin ekonomi desa ?...



0

Disleksia Kebijakan Pemimpin Negeri



Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Negara sedang mengencangkan ikat pinggang lewat efisiensi, tetapi struktur birokrasi justru bertambah dengan pembentukan Kemenko baru...

0



M. Hazim Al Ahzab
Founder Institut Alas Tani

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Diserahkan, Ke Mana Arah Penegakan Hukumnya?



Founder Institut Alas Tani - 1 hari lalu

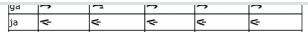
Hukum pidana bukan alat menagih kesalahan administratif. Ketika aset publik dipersoalkan, yang dibutuhkan ialah kejelasan atas arah penyelesaian...

0

Artikel Terbaru

Renungan Malam
Tentang Rais Am

1 jam lalu



19 jam lalu



Dewan Penasihat atau Circle Kekuasaan Baru

19 jam lalu



Ketika Sekolah Gagal Melindungi Murid

19 jam lalu



Gen Z Tak Hanya Ingin Kerja Remote, tapi Juga Waktu yang Fleksibel

19 jam lalu

Lihat semua

Terkini di Pilihan Editor



Politik Mbelgedes: Pintu Belakang Kekuasaan

19 jam lalu

Awalnya Cuma FOMO Lari, kok, Malah Jadi Boros?



Membeli?

1 hari lalu



Inflasi Bulan September Terkendali, tapi Dapur Rakyat Terasa Berat

2 hari lalu



Disleksia Kebijakan Pemimpin Negeri

2 hari lalu

Lihat semua

Terpopuler di Pilihan Editor



Disleksia Kebijakan Pemimpin Negeri

2 hari lalu



Parkir Rp20 Ribu di Jogja: Harga Sebuah Ketidakpastian

2 hari lalu

Menarik Investasi Hijau Melalui Skema Nilai



Hari Tani Tanpa Kedaulatan Petani

Selasa, 29 September 2026 09:14 WIB



Jebakan Dark Productivity Gen Z dan Sisi Gelap Hustle

4 hari lalu

Lihat semua